

## Determinan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem

Ni Komang Widia Sentani<sup>1</sup> I Nyoman Mahaendra Yasa<sup>2</sup>

Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [komangwidya050@gmail.com](mailto:komangwidya050@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Memiliki kehidupan yang sejahtera merupakan impian yang ingin dicapai oleh setiap orang karena kualitas hidup masyarakat digambarkan melalui tingkat kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dengan mengamati sudut pandang lain dari penerapan pembangunan manusia atas dasar tiga indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, serta daya beli. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada pada posisi “sedang” dan paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali, artinya terjadi ketimpangan/disparitas kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem adalah tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Desain penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif yang bersifat asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karangasem. Sumber data penelitian ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem pada periode tahun 2010-2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Karangasem. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan dan dianalisis menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara parsial, tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, dan angka kesakitan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Angka Partisipasi Murni (APM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan implikasi hasil penelitian, bahwa alokasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran mampu memutus rantai kemiskinan sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya menurunkan rasio ketergantungan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan peningkatan pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga menekan angka kelahiran dan kematian. Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan dan perbaikan sekolah dan penyediaan bahan ajar yang berkualitas sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan kualitas sanitasi melalui penggunaan jamban sehat akan berdampak pada penurunan angka kesakitan.

**Kata Kunci:** Angka Kesakitan, Angka Partisipasi Murni, Kesejahteraan Masyarakat, Rasio Ketergantungan, Tingkat Kemiskinan

### Abstract

*Having a prosperous life is a dream that everyone wants to achieve, as the quality of life in society is reflected through the level of welfare. By using the Human Development Index (HDI) as a benchmark for societal welfare and observing other perspectives on human development based on three indicators, health, education, and purchasing power. The Karangasem Regency is a region where the HDI ranking is still at a "medium" level and is the lowest compared to other regencies in Bali Province, indicating a disparity in the welfare of the people in Karangasem Regency. This study aims to analyze the simultaneous and partial effects of poverty level, dependency ratio, Gross Enrollment Ratio (GER), and health indicators on the welfare of the people in Karangasem Regency. The research design used is a quantitative method of an associative nature. The research location is in Karangasem Regency and the data source comes from publications by the Badan Pusat Karangasem (BPS) of Karangasem Regency from the period from 2010 to*

2023. The type of data in this study is quantitative, sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of Karangasem. The data collection methods used in this study include non-participant observation and analysis using multiple linear regression models. The results show that poverty level, dependency ratio, Gross Enrollment Ratio (GER), and morbidity rates have a significant simultaneous effect on the welfare of the people. Partially, poverty level, dependency ratio, and morbidity rates have a negative and significant effect on societal welfare. Conversely, the Gross Enrollment Ratio (GER) has a positive and significant effect on societal welfare. Based on the implications of the research findings, targeted education budget allocation can break the cycle of poverty, thereby reducing the poverty rate. Efforts to reduce the dependency ratio can be made through improving the quality of health personnel and increasing the utilization of the National Health Insurance (JKN), which can lower birth and death rates. The government should focus more on developing and improving schools and providing quality teaching materials to increase the Pure Participation Rate (PPR). Improving sanitation quality through the use of healthy latrines will impact the reduction of the morbidity rate.

**Keywords:** Community Welfare, Dependency Ratio, Gross Enrollment Ratio, Morbidity Rate, Poverty Level



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pembangunan dalam kawasan tertentu, keberadaannya memiliki potensi yang kuat sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah sekitarnya (Teja, 2015). Memiliki kehidupan yang sejahtera merupakan impian yang ingin dicapai oleh setiap orang karena kualitas hidup masyarakat digambarkan melalui tingkat kesejahteraan. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi akan memiliki kualitas hidup lebih layak. Kesejahteraan bersifat relatif karena bergantung pada tingkat kepuasan yang diperoleh melalui konsumsi kebutuhan berdasarkan pendapatan yang diterima. Konsep kesejahteraan ditujukan untuk tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pertama, untuk tingkat individu lebih berfokus pada kualitas hidup. Kedua, untuk tingkat keluarga meliputi keadaan perumahan yang cukup. Ketiga, dalam tingkatan masyarakat, seperti angka pengangguran, angka kesakitan (morbidity), dan tuna wisma. Menurut Todaro & Smith (2011:9), kesejahteraan memiliki pengertian yaitu kondisi manusia saat mampu untuk memenuhi kebutuhan material, mendapat kehormatan (*esteem*), dan mencapai kebebasan untuk memiliki (*freedom of choice*). Hidup dengan sejahtera tidak didapatkan begitu saja, tetapi diperlukan pengorbanan serta usaha dalam melakukan berbagai cara yang harus ditempuh untuk meraih hal yang diinginkan oleh semua orang. Salah satu contoh pengorbanan yang dilakukan seperti menjalankan pendidikan sampai tingkat tertinggi, dengan begitu individu tersebut akan mendapat pekerjaan yang layak dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melangsungkan hidup. Indikator yang digunakan dalam mengukur kondisi kesejahteraan masyarakat cukup bervariasi. Dari waktu ke waktu telah terjadi perubahan atas pengukuran tingkat kesejahteraan (Sukmasari, 2020). Indikator pendapatan, tenaga kerja, dan hak-hak sipil pernah dipakai untuk menghitung tingkat kesejahteraan dengan harapan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi, tetapi indikator tersebut tidak memengaruhi tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat sehingga terjadi perubahan dimana tingkat kesejahteraan diukur dengan indikator *Human Development Index* (HDI).

Dengan menggunakan HDI, kesejahteraan tidak menekan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan manusia penting mendapat perhatian karena tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu menyelesaikan permasalahan kesejahteraan (Muliyawati & Sasana, 2022). Pembangunan sumber daya manusia juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara. Negara yang masuk dalam kategori negara maju memiliki beberapa kriteria, yaitu pendapatan per kapita tinggi, modal

manusia tinggi, dan kerentanan ekonomi rendah. Menurut pakar ekonom yakni Becker (2002:01), menyebutkan bahwa manusia sebagai modal pembangunan didefinisikan sebagai pengetahuan, informasi, ide, keahlian, dan kesehatan dari seorang individu. HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting dalam mengamati sudut pandang lain dari pembangunan dan membuktikan kedudukan pembangunan suatu negara serta menerangkan hasil dari penerapan pembangunan manusia atas dasar tiga indikator, yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta tingkat ekonomi (ukuran pendapatan berdasarkan daya beli). *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan IPM sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” yang berarti suatu proses yang meningkatkan aspek kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, perhitungan IPM dimulai sejak tahun 1996 dan dilakukan secara bertahap setiap tiga tahun sekali dengan menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, pada tahun 2004 mengalami perubahan yaitu IPM dihitung setiap tahun serta pada tahun 2014 indikator IPM telah merujuk pada metode baru tetapi tetap berpedoman terhadap UNDP dengan beberapa penyesuaian.

Perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap daerah menyebabkan faktor pengaruh perkembangan manusia antar daerah juga berbeda, hal ini menjadi permasalahan umum yang sering terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia. Disparitas/ketimpangan akan mengarah pada kondisi standar hidup yang relatif pada seluruh lapisan masyarakat. Terjadi pola saling bergantung terhadap berbagai macam kebutuhan sering dijumpai di seluruh daerah seperti kesehatan dan pendidikan yang tidak terpenuhi dan juga beberapa jenis kebutuhan dan ketersediaan pada tiap daerah berbeda (Sutono, 2021). Selain itu, perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu/kelompok dan rendahnya mobilitas sosial akibat kurangnya investasi sektor transportasi sehingga tidak adanya interaksi satu wilayah dengan wilayah lainnya menjadi penyebab ketimpangan. Wilayah dengan masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih besar dibandingkan ketersediaan sumber daya merupakan wilayah dengan disparitas kesejahteraan paling tinggi (Sultan *et al.*, 2023). Secara keseluruhan, perkembangan IPM Provinsi Bali konsisten mengalami kenaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hanya terdapat dua kabupaten/kota yang masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sedangkan beberapa kabupaten lainnya berada pada posisi tinggi. Dari keseluruhan kabupaten yang ada di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem menduduki peringkat terakhir nilai IPM paling rendah dan masuk dalam kategori rendah pada tahun 2023. Selama periode tahun 2019 hingga 2021 nilai IPM Kabupaten Karangasem mengalami perlambatan, dimana pertumbuhan skor IPM hanya sebesar 0,1 poin. Selanjutnya, mengalami perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni hingga mencapai 68,91 poin pada tahun 2023. Kabupaten Karangasem merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami ketertinggalan dan memiliki skor nilai yang cukup jauh dengan nilai rata-rata IPM Provinsi Bali dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Skor IPM menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem yang berada dalam ketimpangan kesejahteraan. Dilihat dari kekayaan alam yang dimiliki, Kabupaten Karangasem memiliki modal sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan domestik ataupun mancanegara yang ingin menjelajahi daerah yang berada di ujung timur Pulau Bali ini. Untuk memberi rasa kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung, tentunya pemerintah Kabupaten Karangasem perlu menyediakan fasilitas infrastruktur yang memadai. Mengoptimalkan investasi terhadap infrastruktur ini nantinya akan berimbas pada beberapa sektor lainnya, seperti industri kreatif, perdagangan, dan jasa.

Akibat perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur di beberapa kabupaten di Provinsi Bali ini menyebabkan disparitas/ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan Kota Denpasar, dimana seluruh kegiatan termasuk pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain sebagainya berpusat di kota ini secara tidak langsung dapat menarik sumber daya manusia yang memiliki pendidikan/kualitas tinggi mengembangkan sektor di Kota Denpasar. Berbanding terbalik dengan kondisi di Kabupaten Karangasem, ketersediaan akan sarana prasana kesehatan dan pendidikannya relatif kurang lengkap. Selain itu, sistem upah yang berlaku sangat berbeda dimana banyak tenaga kerja yang bekerja di Kota Denpasar yang diberi upah (gaji) sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Kondisi ini lah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan manusia antara Kabupaten Karangasem dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Awal tahun 2020 Presiden Indonesia, Presiden Joko Widodo menyatakan secara resmi untuk pertama kalinya kasus *Covid-19* di Indonesia dan semakin menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Karangasem. Dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menghimbau masyarakat untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan penyebaran virus *Covid-19* sehingga berdampak perekonomian di berbagai sektor serta roda perekonomian pun nyaris berhenti berputar. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini (Kurniawan, 2021).

Kabupaten Karangasem memiliki tingkat presentase kemiskinan tertinggi diantara kabupaten lainnya di Provinsi Bali dalam kurun waktu dua tahun setelah virus *Covid-19* merebak di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kasus pandemi *Covid-19* sudah menurun, akan tetapi presentase tingkat kemiskinan pada tahun 2021 dan tahun 2022 di Kabupaten Karangasem masih tetap tinggi yaitu sebesar 6,78 persen dan kembali meningkat sebesar 6,98 persen. Pada tahun berikutnya, Kabupaten Karangasem cukup mampu menekan tingkat kemiskinan sebesar 6,56 persen. Dampak negatif yang timbulkan oleh pandemi *Covid-19* ini yaitu berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat dan adanya kecenderungan masyarakat menahan pengeluaran. Rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Apabila jumlah penduduk usia produktif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif maka akan menunjukkan hasil tingkat rasio ketergantungan yang tinggi. Secara sederhana dapat diartikan bahwa rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai kebutuhan penduduk usia non produktif (Budi Utami, 2020). Rasio ketergantungan dijadikan tolak ukur dalam menggolongkan negara ke dalam kondisi ekonomi, yaitu negara maju atau berkembang. Rasio ketergantungan di Kabupaten Karangasem dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Terjadi penurunan rasio ketergantungan pada tahun 2019 hingga 2022, penurunan rasio ketergantungan yang terjadi disebabkan jumlah penduduk usia produktif yang terus bertambah. Tahun 2019 merupakan tahun dengan angka rasio ketergantungan yang paling tinggi di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 52,82 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 52 sampai 53 orang penduduk non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka tersebut menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai 48,93 persen pada tahun 2022, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 49 orang penduduk non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Jika dibandingkan dengan presentase rasio ketergantungan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten dengan presentase rasio ketergantungan paling tinggi hal ini diduga akibat arus urbanisasi penduduk produktif banyak yang mencari nafkah di Kota Denpasar dan penduduk non produktif tinggal di daerah asalnya. Daerah dengan presentase rasio ketergantungan yang tinggi berdampak pada menurunnya produktivitas kerja di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan setengah pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup beban penduduk usia non produktif yang ditanggung sehingga kurangnya kebutuhan akan makanan bergizi, mengakses pelayanan kesehatan, dan pendidikan dengan baik (Aprilia & Triani, 2022). Menurut Pramesti *et al.* (2022), salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menurunkan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Karangasem yaitu melakukan investasi terhadap modal manusia sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Pendidikan merupakan modal dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu dan menjadi prioritas utama yang perlu dikembangkan sejak dini. Sekolah menjadi wadah untuk mengenyam pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka akan memiliki peluang mencapai kesejahteraan yang tinggi pula. Untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat melalui indikator pendidikan, pada tahun 2016 pemerintah memberlakukan program penerapan wajib belajar dengan menempuh pendidikan serendah-rendahnya sampai jenjang pendidikan menengah atas (kelas 12) hal ini setara dengan penerapan wajib belajar 12 tahun yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) (Margiyanti & Tiara, 2023). Namun, dibalik penerapannya masih terdapat kendala yang dialami seperti banyaknya masyarakat yang belum menjadikan kebutuhan pendidikan menjadi prioritas utama sehingga masih terdapat banyak anak yang putus sekolah terutama anak-anak yang berada di perdesaan. Untuk memantau perkembangan penyelenggaraan kinerja sistem pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan beberapa indikator salah satunya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dengan melihat jumlah penduduk yang bersekolah tepat waktu. Data APM yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APM jenjang SMA/SMK/Sederajat di Kabupaten Karangasem dengan penduduk usia 16 sampai 18 tahun, hal ini dikarenakan jenjang SMA/SMK/Sederajat merupakan salah satu tingkatan sekolah menengah yang memberikan fasilitas dalam menentukan minat dan kemampuan sehingga dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja (Istiqomah *et al.*, 2018). Penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/Sederajat, kemudian akan menjadi bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas dan mempermudah tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan mengamati dan membandingkan peringkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan poin IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan hasil bahwa terdapat kabupaten yang mengalami ketimpangan dalam pembangunan SDMnya yaitu Kabupaten Karangasem. Untuk mengetahui variabel apa saja yang diduga memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem, maka perlu dilakukan penelitian yang berpedoman pada hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh beberapa variabel, yaitu tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM) serta angka kesakitan yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dianalisis oleh Novitasari & Wenagama (2020), menunjukkan rasio ketergantungan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan secara parsial rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Azzahra & Desmawan (2023) yang mengatakan bahwa secara parsial variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karna cenderung menghabiskan waktunya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Rosyadah (2021), menerangkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) memiliki hubungan yang positif terhadap variabel IPM sehingga peningkatan APM akan meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di NTT. Penelitian juga dilakukan oleh Sukmawati *et al.* (2023), yang membuktikan bahwa angka kesakitan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat tahun 2019-2021. Virus *Covid-19* yang melanda Kalimantan Barat memperburuk kondisi angka kesakitan bahkan berujung kematian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem? Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan secara simultan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Untuk menganalisis pengaruh, tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian adalah rancangan yang dilakukan peneliti dan menyusun langkah-langkah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam desain penelitian yaitu metode asosiatif dan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:57), rancangan penelitian asosiatif bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara variabel tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat Kesimpulan yang lebih luas. Penelitian dengan kuantitatif berarti metode yang digunakan untuk meneliti variabel dan menganalisis data statistik dengan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam Penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem terletak di wilayah timur dari Provinsi Bali dengan Ibu kotanya adalah Kota Amlapura. Kabupaten Karangasem terbagi ke dalam delapan kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu. Dipilihnya lokasi ini karena Kabupaten Karangasem memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Provinsi Bali. Kabupaten Karangasem merupakan satunya-satunya kabupaten yang mengalami ketertinggalan skor pembangunan manusia atau masih berada di kategori sedang. Ketimpangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karangasem berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat berada pada tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang baik, secara umum hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas atau daya dukung kepada masyarakat untuk mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik dan berkualitas. Oleh karena itu, dengan mengetahui bagaimana pengaruh variabel penelitian diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), angka kesakitan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan rentang tahun 2010 hingga 2023. Terdapat dua macam jenis

data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang didapatkan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif merupakan data yang dilakukan melalui wawancara. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka dan dapat dihitung. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem yaitu, presentase tingkat kemiskinan, presentase rasio ketergantungan, presentase Angka Partisipasi Murni (APM), dan presentase angka kesakitan di Kabupaten Karangasem tahun 2010-2023.

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem, internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder merupakan data yang berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang telah dikumpulkan dan telah diolah oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat digunakan untuk kepentingan analisis data (Sugiyono, 2017:402). Data yang digunakan adalah periode tahun 2010-2023. Pemilihan periode ini disebabkan karena metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perubahan di tahun 2010 serta di tahun 2020-2023 merupakan peralihan kondisi menuju *era new normal* sehingga menjadi tantangan dalam pemulihan kondisi ekonomi dan nilai IPM di Kabupaten Karangasem yang mengalami perkembangan yang cukup lambat akibat krisis ekonomi pasca pandemi *Covid-19*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kabupaten Karangasem**

Kabupaten Karangasem merupakan satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali yang berada pada ujung timur Pulau Dewata dengan luas sebesar 839,24 km<sup>2</sup> atau 83,924 Ha. Secara astronomis, letak kabupaten ini berada pada posisi 8°00'00"-8°41'37,8" LS dan 115°35'9,8"-115°54'8,9" BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem, yakni di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, di sebelah barat dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Secara administrasi kewilayahan, Kabupaten Karangasem terdiri atas 8 kecamatan, 75 desa, dan 3 kelurahan, 532 banjar dinas, 52 lingkungan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Karangasem, pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem terhitung sebanyak 530,4 ribu jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem selalu meningkat tiap tahunnya. Dampak positif dari bertambahnya jumlah penduduk di wilayah ini adalah tersedianya tenaga kerja sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat. Akan tetapi, hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan produksi pangan yang cukup. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Karangasem bermata pencaharian berada pada sektor pertanian, perkebunan, kehutan, dan perikanan.

### **Pengeluaran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan**

Pengeluaran pemerintah atau pengeluaran publik merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai program pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik seperti pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Setiap aktivitas yang dilakukan pemerintah terceminan melalui pengeluaran pemerintah yang dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan daerah atau negara, perekonomian, dan juga pembangunan manusia. Pelayanan dasar yang mencakup didalamnya adalah layanan pendidikan dan layanan kesehatan guna meningkatkan pembangunan manusia. Beberapa dekade terakhir, Indonesia melakukan banyak perubahan terutama pada bidang

pendidikan. Perubahan dilakukan agar mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lainnya. Pada tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan dan 10 persen untuk anggaran kesehatan (*mandatory spending*). Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan pengeluaran paling dasar dalam pembangunann manusia.

### **Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur untuk mengetahui kualitas dari pembangunan sumber daya manusia dan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ekonomi memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Indikator ini terdiri dari tiga komponen utama yang mencakup dimensi kesehatan melalui indikator angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan melalui indikator gabungan antara indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak melalui indikator kemampuan daya beli. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 merupakan masa dimana seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karangasem terdampak pandemi *Covid-19*. Jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita pada tahun 2019, maka terlihat bahwa telah terjadi penurunan terhadap pengeluaran per kapita yang disesuaikan secara berturut-turut. Hal ini yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang melanda memengaruhi kondisi ekonomi, mulai dari tindakan *panic buying* yang dilakukakan masyarakat, indeks harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (*manufaktur*), dan berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal lainnya berdampak pada pola konsumsi masyarakat, dimana sebagian besar konsumsi masyarakat beralih ke barang-barang kebutuhan pokok sebagai bentuk antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel bebas (X) yang terdiri dari tingkat kemiskinan ( $X_1$ ), rasio ketergantungan ( $X_2$ ), Angka Partisipasi Murni (APM) ( $X_3$ ), dan angka kesakitan ( $X_4$ ) terhadap variabel terikat (Y) yaitu kesejahteraan masyarakat yang telah menggunakan teknik analisis linear berganda dengan bantuan SPSS secara simultan dan parsial.

### **Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Rasio Ketergantungan, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Kesakitan Secara Simultan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, angka partisipasi murni (APM), dan angka kesakitan secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yaitu nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$ ,  $45,841 > 3,633$  dan nilai  $Sig. < 0,05$  yakni  $0,000 < 0,05$ . Melalui analisis regresi linear berganda diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa koefisien determinasi pada tabel Adjust R Square adalah 0,953 atau 95,3 persen yang mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 95,3 persen, sedangkan sisanya sebesar 4,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Kemiskinan tentu memiliki pengaruh besar dan sangat kompleks terhadap kesejahteraan masyarakat, keadaan ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat memiliki sedikit peluang mendapatkan pekerjaan lebih baik, sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan dengan upah tinggi, dan kualitas kesehatan yang buruk akibat biaya pengobatan yang tinggi sehingga mengurangi tingkat produktivitas masyarakat (Zulfa *et al.*, 2023). Rasio

ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Rasio ketergantungan yang tinggi berarti banyak penduduk usia produktif (penduduk usia 15 tahun hingga 65 tahun) yang membiayai kebutuhan pokok penduduk usia non produktif (penduduk usia 0 hingga 14 tahun dan 65 tahun keatas) sehingga menghambat pembangunan. Tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan program pembangunan manusia di suatu daerah, semakin banyak penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik (Istiqomah *et al.*, 2018). Pendidikan menjadi jembatan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik karena telah menjadi masyarakat yang berkualitas dan lebih kompeten dalam dunia kerja. Angka kesehatan menjadi gambaran kualitas kesehatan masyarakat, daerah dengan angka kesehatan yang tinggi mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan di daerah tersebut tergolong buruk (Lestari & Harsanti, 2022). Permasalahan tingginya angka kesakitan akan berdampak pada terganggunya perekonomian di suatu daerah, hal ini dikarenakan terganggunya akitifitas sehari-hari dan berkurangnya tingkat produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang dimiliki dan berujung pada kemiskinan.

### **Pengaruh Tingkat Kemiskinan Secara Parsial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan maka akan semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hal ini terjadi karena kemiskinan sering kali mengakibatkan keterbatasan dalam akses terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Akibatnya, masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Teori Nurske dalam Kuncoro (1997:132), menyebutkan seluruh penyebab kemiskinan akan kembali pada prinsip lingkaran setan kemiskinan (*vicious cirle of poverty*). Kurangnya tingkat pendapatan rill yang dimiliki penduduk miskin menyebabkan rendahnya kemampuan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi. Akibat rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas kerja masyarakat. Rendahnya produktivitas tersebut akan juga akan memengaruhi besaran upah yang diterima. Pada umumnya upah yang diterima hanya sedikit dan hanya mampu membiayai kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini akan terus berlanjut ketika sepasang suami istri memutuskan untuk memiliki anak. Dengan sedikitnya pendapatan yang dimiliki menyebabkan ketidaksanggupan orang tua untuk membiayai kebutuhan pendidikan anaknya. Pola ini akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, apabila tidak adanya tindakan untuk memutus rantai lingkaran setan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulia & Putri (2022) dan penelitian oleh Tahan Upoyo Trisno *et al.*, (2021), yang menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat IPM. Paradigma pembangunan yang kini bergeser dari dominasi peran negara kepada peran masyarakat tidak akan dapat diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan. Hal demikian dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagian besar penduduk miskin tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian-penelitian tersebut memperjelas bahwa semakin tinggi populasi penduduk miskin akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah. Ketika kemiskinan meningkat, kemampuan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ekonomi dan sosial berkurang

sehingga mengarah pada penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Kondisi ini biasa ditemukan di daerah yang jauh dari perkotaan karena memiliki persoalan baik secara geografis (terpencil dan terasingkan) maupun non-geografis (aksesibilitas dan kualitas SDM yang rendah). Dilihat dari perkembangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan secara lambat yakni hanya sekitar 0,475 ribu rupiah. Perkembangan yang lambat tersebut mengindikasikan bahwa tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap jenis pengeluaran masyarakat. Pengeluaran tersebut dapat dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem yang cukup banyak.

Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang masuk dalam tiga kabupaten dengan penduduk terbanyak di Provinsi Bali yakni sebesar 540,4 ribu jiwa. Dengan banyaknya penduduk yang tinggal di Kabupaten Karangasem seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Akan tetapi, kondisi ini menjadikan Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi akibat buruknya kualitas sumber daya manusia. Kualitas penduduk di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada indikator bidang kesehatan dan pendidikan seperti rendah tingkat pendidikan yang dicapai dan tingginya angka kesakitan. Jika dilihat data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Karangasem dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah ini hanya mampu menempuh pendidikan hingga kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018:51), sebanyak 55 respon (51 persen) dari 108 responden di salah satu kecamatan di Kabupaten Karangasem sudah memiliki pengetahuan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 53 orang yang merespon (49 persen) yang kurang kesadaran akan pentingnya pengetahuan mengenai PHBS. PHBS sendiri merupakan salah satu upaya dasar dalam meningkatkan kualitas kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengkonsumsi makanan sehat, dan olahraga secara rutin. Apabila derajat kesehatan masyarakat tinggi, maka akan mempengaruhi tingginya tingkat produktivitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, baik bekerja atau bersekolah dan berimplikasi pada pendapatan yang tinggi dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Rasio Ketergantungan Secara Parsial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan maka akan semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Rasio ketergantungan yang semakin tinggi dapat diartikan bahwa semakin banyak beban yang ditanggung penduduk produktif, sehingga menyebabkan sebagian besar pendapatan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk non produktif. Teori transisi demografi menjelaskan perubahan dalam struktur populasi seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Masa dimana penduduk usia produktif jauh melebihi penduduk non produktif ini menjadi penyebab terjadinya rasio ketergantungan. Beban ekonomi yang berat pada kelompok usia produktif ini sering kali mengurangi kapasitas mereka untuk berinvestasi dalam kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya yang mendukung kesejahteraan. Seiring dengan meningkatnya rasio ketergantungan, penurunan daya beli dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih nyata, yang berdampak langsung pada penurunan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caesaktiti *et al.*, (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Woyanti (2021) yang menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Semakin besar angka rasio

ketergantungan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif menanggung penduduk usia tidak produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Akibatnya, beban tambahan yang dihadapi oleh kelompok usia produktif mengurangi kapasitas mereka untuk mendukung kesejahteraan diri dan keluarga mereka, sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurunnya angka rasio ketergantungan yang tinggi dipengaruhi oleh menurunnya angka kelahiran dan angka kematian. Dalam menangani permasalahan tingginya angka kelahiran, pemerintah membentuk program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Partisipasi masyarakat dalam mendukung program Kampung KB ini dibuktikan oleh besaran presentase akseptor KB aktif di Kabupaten Karangasem selama periode lima tahun terakhir sebesar 64,36 persen dari jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yakni sebanyak 79.609 PUS pada tahun 2023. Angka tersebut mendeskripsikan bahwa program ini belum dilaksanakan secara efektif karena faktor dari kurangnya jumlah tenaga kerja dan alokasi anggaran yang tidak menyeluruh sehingga masih terdapat 35,64 persen yang belum menggunakan akseptor KB aktif. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Karangasem sedikit demi sedikit mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya Meningkatnya AHH tersebut menjadi pertanda terjadinya penurunan angka kematian (mortalitas) dan meningkatnya taraf hidup masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Fenomena kenaikan presentase usia produktif di Kabupaten Karangasem beberapa waktu terakhir berpeluang mengalami bonus demografi, yang mendasakan bahwa kabupaten ini berada pada kondisi atau ukuran yang sangat ideal terhadap perbandingan antara penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Bonus demografi ini biasanya terjadi hanya satu atau dua tahun saja karena penduduk lansia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Bertambahnya jumlah penduduk usia produktif ini akan meningkatkan perekonomian karena terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja. Apabila seluruh tenaga kerja terserap akan menambah total output yang diperoleh dan mampu memberbesar tabungan bagi penduduk usia produktif. Tabungan ini akan lebih bermakna jika diinvestasikan untuk kegiatan yang produktif.

### **Pengaruh Angka Partisipasi Murni Secara Parsial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa angka partisipasi murni berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka partisipasi murni maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hal ini dikarenakan semakin tinggi angka partisipasi murni yang mengukur persentase anak usia sekolah yang terdaftar di sekolah mencerminkan akses dan keterlibatan yang lebih baik dalam pendidikan. Teori transisi demografi menjelaskan bahwa selama transisi demografi, peningkatan dalam angka partisipasi pendidikan mencerminkan pergeseran menuju populasi yang lebih terdidik dan terampil. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya berhubungan dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi karena mendapatkan upah atau gaji yang sesuai. Dengan demikian, semakin tinggi Angka Partisipasi Murni (APM), semakin besar kemungkinan masyarakat untuk mengalami perbaikan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan, karena pendidikan yang lebih baik membuka lebih banyak peluang ekonomi dan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadah (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Asmita Tumanggor & Elmanani Simamora (2023) yang menyimpulkan bahwa angka partisipasi murni berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Bagi negara berkembang, pendidikan dasar menjadi prioritas utama untuk mengembangkan sumber daya manusia sejak dini, karena pendidikan yang baik pada tahap awal memengaruhi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu di masa depan. Dengan meningkatkan angka partisipasi murni, negara dapat memastikan bahwa lebih banyak anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Seseorang dengan pendidikan yang rendah tentunya memiliki batasan dalam memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam menyediakan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Kondisi ini dirasakan oleh banyak orang tua di Kabupaten Karangasem dengan tingkat pendidikan dan berpenghasilan rendah yang tidak mampu menyekolahkan anggota keluarganya sampai ke tingkat tinggi, hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem yang hanya mengenyam pendidikan hingga 6 tahun atau setara dengan kelas 6 pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Kondisi tersebut jauh dari batasan aturan wajib belajar yang digalakkan oleh pemerintah yaitu 12 tahun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 mengenai alokasi biaya pendidikan minimal 20 persen dari APBD, pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalokasikan biaya pendidikan sesuai aturan tersebut.

Mutu pendidikan dasar dan menengah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai landasan dan kriteria yang harus dipenuhi. Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (PTK), standar sarana dan prasarana pendidikan, dan standar pengelolaan pendidikan belum ada sekolah jenjang menengah yang mencapai SNP. Selain itu, perkembangan standar PTK dan sarana prasana tiap tahunnya mengalami sedikit penurunan (Ardana & Dirga, 2019). Penyebab tidak tercapainya mutu pendidikan tersebut adalah ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai (gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain), latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu, gaya serta metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat, dan kemampuan belajar siswa, serta rasio murid sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat yang meningkat pada tahun ajaran 2023/2024 yang menampung sebesar 524 siswa. Besaran rasio murid sekolah tersebut tidak sebanding dengan jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah jenjang SMA/SMK/Sederajat yang hanya terdapat 32 sekolah di Kabupaten Karangasem.

### **Pengaruh Angka Kesakitan Secara Parsial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kesakitan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka kesakitan maka akan semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hal ini dikarenakan semakin tinggi angka kesakitan, yaitu tingkat prevalensi penyakit atau kesehatan yang buruk, mengakibatkan peningkatan beban kesehatan dan pengeluaran medis. Teori sosial demografi menjelaskan bahwa tingkat kesehatan masyarakat, termasuk angka kesakitan, berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan ekonomi. Tingginya angka kesakitan menunjukkan masalah kesehatan yang signifikan, yang mengarah pada peningkatan beban biaya medis dan berkurangnya produktivitas kerja. Kondisi kesehatan yang buruk mengurangi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam ekonomi, sehingga menurunkan

pendapatan dan kualitas hidup mereka, yang pada akhirnya berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022) dan penelitian oleh Putra (2024) yang menyimpulkan bahwa angka kesakitan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Tingginya angka kesakitan sering kali berhubungan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan dan perawatan medis yang memadai. Ketidakmampuan untuk mengelola dan mengobati penyakit dengan efektif dapat mengurangi potensi produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial. Kondisi kesehatan yang buruk menghambat kemampuan individu untuk mengejar peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik, sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan manusia, khususnya pada bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ini yaitu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyakit-penyakit yang dialami biasanya disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan yang salah, dan lingkungan yang tidak bersih seperti kurang gizi, penyakit infeksi, perumaham, air minum yang sehat, dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa terjadi penurunan penggunaan jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar pada tahun 2023 yakni hanya sebesar 69,59 persen dan ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan kloset tangka septik/IPAL/ISPAL khususnya masyarakat golongan 40 persen terbawah. Penggunaan jamban yang sesuai prosedur merupakan salah satu hal yang sering diabaikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah yang sebagian besar pedesaan. Fasilitas buang air besar harus mendapat perhatian karna sebagian besar masalah kesehatan berasal dari tinja yang memiliki banyak bibit penyakit.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan agar peserta dapat memperoleh mafaat pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013, bahwa kepesertaan JKN bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Adapun data BPS Kabupaten Karangasem menerangkan terjadinya penurunan presentase terhadap penduduk yang berobat jalan serta menggunakan jaminan kesehatan di Karangasem. Presentase terendah tersebut didominasi oleh kelompok menengah, dimana kelompok ini terjebak antara ketidakmampuan membayar jaminan kesehatan dan anggapan masih menyanggupi untuk tidak mendapat bantuan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Pemerintah daerah menjadi tulang punggung implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan dan peran pemerintah Kabupaten Karangasem sangat menentukan dalam mengoptimalkan program ini. Jika dilihat dari presentase anggaran kesehatan di Kabupaten Karangasem, alokasi anggaran ini sudah berpedoman pada kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai alokasi anggaran pada bidang kesehatan sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar 10 persen diluar gaji ASN. Namun, alokasi tersebut masih belum mampu mengatasi meningkatkan derajat kesehatan secara signifikan. Masih diperlukannya pengefisienan dana dan memperluas jangkauan dalam memberikan fasilitas secara merata sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara tingkat kemiskinan, Angka Partisipasi Murni (APM), rasio ketergantungan, dan angka kesakitan dengan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan

pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diuraikan beberapa implikasi hasil penelitian sebagai berikut: Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi secara signifikan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Kemiskinan membatasi akses individu terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan yang efektif, seperti anggaran pendidikan yang dialokasikan secara merata guna menunjang hambatan biaya pendidikan bagi masyarakat dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dalam mewujudkan proses pembelajaran yang optimal, khususnya daerah pelosok dan sulit dijangkau. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), maka pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pemantauan dengan memanfaatkan pola interaksi dengan beberapa organisasi pada masing-masing desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Rasio ketergantungan yang tinggi memberikan beban tambahan pada penduduk produktif dan dapat mengurangi kapasitas mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya kebijakan yang mendukung keseimbangan struktur demografis, seperti meningkatkan tambahan dana terhadap akses ke layanan kesehatan, melakukan penyuluhan dan pendekatan secara emosional ke daerah terpencil mengenai pentingnya penggunaan akseptor KB guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga dapat menekan angka kelahiran di Kabupaten Karangasem, serta adanya penambahan jumlah petugas pelayanan KB dan memiliki keahlian intrapersonal agar PUS nyaman dan lebih terbuka.

Angka Partisipasi Murni (APM) berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Masyarakat dengan pendidikan yang tinggi, tentunya berpeluang mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang sesuai. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan investasi dalam sektor pendidikan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang sesuai, baik itu gedung atau peralatan yang mendukung dalam pengembangan keahlian dan minat bakat siswa, penyediaan bahan ajar yang berkualitas, pemberlakuan program pelatihan keterampilan yang diperlukan dalam profesi guru sebagai syarat untuk mendapat sertifikasi pendidik, dan program dukungan untuk meningkatkan partisipasi dan pencapaian pendidikan, khususnya jenjang SMA/SMK/Sederajat. Angka kesakitan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Tingkat kesehatan yang buruk mengakibatkan beban biaya medis yang tinggi dan menurunkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mengurangi kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya peningkatan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, memperbesar alokasi anggaran kesehatan khususnya mengenai pemanfaatan jamban atau sanitasi lingkungan yang disertai pendampingan dan edukasi. Selanjutnya, anggaran kesehatan ini juga dapat dialokasikan untuk program pembangunan dan perbaikan jamban sehat secara gratis kepada masyarakat menengah ke bawah, dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait program keuntungan dan manfaat menjadi peserta JKN melalui penyuluhan ke daerah pelosok di Kabupaten Karangasem.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebagai berikut: Tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM) dan angka kesakitan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

Karangasem. Hasil penelitian ini memiliki makna bahwa tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, APM dan angka kesakitan dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, dan angka kesakitan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa ketika variabel tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, dan angka kesakitan mengalami peningkatan maka akan terjadi penurunan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Angka Partisipasi Murni (APM) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa ketika variabel APM mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan pula dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: Untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Karangasem diperlukannya campur tangan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses bantuan anggaran pendidikan guna memberikan kesempatan yang sama bagi penduduk yang berada pada wilayah terpencil di Kabupaten Karangasem untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi yang nantinya akan berdampak pada kenaikan produktivitas kerja dengan upah yang sesuai. Melalui pendidikan tinggi inilah diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Upaya mempertahankan angka rasio ketergantungan yang cukup baik saat ini, penting bagi pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mempertegas kebijakan yang mampu menekan angka kelahiran dan angka kematian sehingga mencapai tingkat kesejahteraan yang didambakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah mampu mengendalikan perkembangan angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB), khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan di Kabupaten Karangasem yang dinilai belum maksimal. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) yang lebih signifikan dapat dilakukan untuk menekan angka kematian di Kabupaten Karangasem. Penurunan angka kematian ini nantinya berdampak pada angka rasio ketergantungan yang semakin kecil. Selain menekan angka kelahiran dan juga menekan angka kematian, upaya pemerintah juga diperlukan untuk meningkatkan tingkat produktifitas masyarakat. Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik memiliki kesempatan dalam memperoleh tingkat produktivitas yang maksimal. Pemberdayaan bagi masyarakat yang telah menempuh pendidikan formal melalui penciptaan hubungan industrial antara sekolah dan pihak swasta penyedia lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan daya saing penduduk usia produktif di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Penting bagi pemerintah Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah harus fokus pada pembangunan dan perbaikan sekolah, serta penyediaan bahan ajar yang berkualitas. Program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu juga dapat mendorong lebih banyak anak untuk bersekolah. Selain itu, program penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan dan manfaat jangka panjangnya dapat membantu meningkatkan partisipasi dan pencapaian pendidikan. Perlu dilakukan pemerataan terhadap kepemilikan jamban yang sehat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Karangasem dengan mengalokasikan anggaran kesehatan untuk membantu masyarakat yang masih belum mampu membangun jamban yang sehat. Upaya lainnya yaitu pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kemudahan mendaftar ataupun

menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, optimal, dan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah terpencil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Nasser, A. D., & Al Hallaq, S. S. (2019). Impact of Human Poverty on The Human Development Index in Jordan Within The Period 2013-2016. *International Journal of Business and Society*, 20(2), 552-562
- Anorital. (2015). Morbiditas dan Multi Morbiditas Pada Kelompok Lanjut Usia di Indonesia. *Jurnal Biotek Medisiana Indonesia*, 4(2), 77-88
- Aprilia, V., & Triani, M. (2022). Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender, Rasio Ketergantungan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(3), 43.
- Ardhiyanti, N. (2016). Trend Angka Morbiditas di Provinsi Bali. *Bali: Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 228-289.
- Asmita Tumanggor, & Elmanani Simamora. (2023). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Spasial. *Jurnal Riset Rumpun Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(2), 01-16.
- Azwar, I., & Achmat, S. (2017). Local Financial Performance and The Social Welfare On Districts and Municipals of South Sulawesi On 2008-2012 : Panel Regression With Random Effect Model (REM). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*, 1(77677), 79-101.
- Azzahra, D. D. G., & Desmawan, D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap kesejahteraan Masyarakat di 34 Provinsi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22034-22044.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem. (2024). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem. (2024a). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karangasem 2023. Karangasem: BPS Kabupaten Karangasem.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem. (2024b). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karangasem 2023. Karangasem: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). Indeks Pembangunan Manusia 2023. Bali: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Bappenas. (2000). Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. In Laporan Program Pemberdayaan Ekonomi Pesisir. Jakarta: Bappenas.
- Becker, G. S. (2002). Human Capital. Jakarta: The National Bureau of Economic Research.
- Budi Utami, R. (2020). Analisis Pengaruh Angka Beban Ketergantungan, Kepadatan Penduduk, Garis Kemiskinan Terhadap Indeks Gini di Indonesia. *MTPH Journal*, 4(2), 213.
- Caesaktiti, W. H. A., Rusdarti, R., & Oktavilia, S. (2021). Peran Gender GAP Memoderasi Rasio Ketergantungan, PDRB, Belanja Publik Terhadap IPM Jawa Tengah 2016-2020. *Business and Economic Analysis Journal*, 1(2), 122-133
- Dewanta, Setya, & Awan. (1995). Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ditaningtias, S., & Ma'arifah, U. (2017). Hubungan Antara Menyusu dan Status Imunisasi dengan Kejadian Sakit dalam Satu Tahun Terakhir pada Anak Usia 0-59 Bulan. *Jurnal Penelitian Suara Forikes*, 8(3), 116, 8(3), 116-120.
- Febrianto, M., & Astrid Maria Esther. (2023). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2841-2850.



- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Penelitian bagi Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Goni, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 121–132.
- Hapsari, M, N., & Hascaryani, T. . (2019). Kajian Respon Permintaan Pendidikan Tinggi Terhadap Kenaikan Biaya Kuliah Dan Pendapatan Masyarakat di Kota Malang (Studi Kasus Pada Universitas Brawijaya Dan Universitas Negeri Malang). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 3.
- Hernandes, J. B. R., & Kim, P. Y. (2021). *Epidemiology Morbidity and Mortality*. National Library of Medicine.
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, Dan Teknologi Terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 23(4), 122–137.
- Ismail, I. F., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 103–114
- Istiqomah, A., Sukidin, & Suharjo, P. (2018). Analisis Partisipasi Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 12, 227–235. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8553>
- Johar, M. R., Suharno, & Istiqomah. (2023). Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka : Mediasi Laju Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 108–117. <https://doi.org/10.23969/oikos.v7i1.6035>
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharuddin, Alfiyari, Syarief, H., & Sukandar, D. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Kurniawan, E. (2021). Penurunan Kesejahteraan Akibat Covid-19. *Jurnal Pustaka Mitra*, 1(2), 60–67.
- Lestari, R. D., & Harsanti, T. (2022). Determinan Kejadian Morbiditas Lansia di Pedesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 373–382
- Margiyanti, I., & Tiara, Si. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Jupensi*, 3(1), 200–201.
- Mason, A., Lee, R., & Jiang, J. X. (2017). Demographic Dividends, Human Capital, and Saving. *J Econ Ageing*, 7, 106–122.
- Mulia, R. A., & Putri, R. P. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 22–33
- Muliyawati, A., & Sasana, H. (2022). Analisis Determinan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 5(1), 104–124. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v5i1.116>
- Nina, G. A., & Rustariyuni, S. D. (2020). Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 24–36
- Novitasari, I., Suharno, & Arintoko. (2021). Pengaruh Keluhan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 239. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1310>

- Novitasari, N. M. A. , & Wenagama, I. . (2020). Pengaruh Angka Kematian Bayi, Angka Partisipasi Sekolah, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 11(8), 3271–3299.
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). Metodologi Penelitian. In A. Muhaimin (Ed.), *UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN (I)*. Banten: Media Edu Pustaka.
- Pramesti, M. P. U., Yasa, I. N. M., & Manegama, I. W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(7), 2669–2695.
- Putra, I. W. G. (2018). Gambaran Perilaku Keluarga Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas ) di Wilayah Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem.
- Putra, Zakaria. (2024). Dampak Morbiditas, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka Partisipasi Murni Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *PAJAMKEU: Pajak dan Manajemen Keuangan*. 1(1)
- Rocco, L., Fumagalli, E., Mirelman, A. J., & Suhrcke, M. (2021). Mortality, morbidity and Economic Growth. *PLoS ONE*, 16(5), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251424>
- Rohana, R., Junaidi, J., & Prihanto, P. H. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Ketergantungan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 6(2), 69–79. <https://doi.org/10.22437/jels.v6i2.11916>
- Rosanti, I. W., & Budiantara, I. N. (2020). Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Morbiditas di Jawa Tengah Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. *Inferensi*, 3(2), 107. <https://doi.org/10.12962/j27213862.v3i2.7712>
- Rosyadah, J. A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1080–1092. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.41076>
- Sapaat, T. M., Lapian, A. L., & Tumangkeng, S. Y. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 45–56.
- Sari, L. A. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Morbiditas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Angka Partisipasi Murni (APM) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2021. *Journal of Management and Social Sciences*, 1(4), 130–143. <https://doi.org/10.55606/jimas.v1i4.95>
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473–479.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2008). Indeks Pembangunan Manusia Manusia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26, 9(1), 18–26. [Uny.ac.id](http://Uny.ac.id)
- Siskawati, N., & Zulfhi Surya, R. (2021). Pengaruh Harapan Lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 7(3), 173–177. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v7i3.231>
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>



- Sukmawati, U. S., Ana, P., & Trisna, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi di Kalimantan Barat. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 188–201
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 75–83
- Susanto, J. (2018). Growth, Nett Enrollment Ratio and Convergence of Human. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 3(1), 22–23
- Sutono. (2021). Guarantee Of Social Needs in Islamic Economic Perspective. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1689–1699
- Syahrani, D., Frieria, A., Aulia, J., Salsabila, P., Maipita, I., & Rinaldy, M. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 590–597. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2555>
- Tahan Upoyo Trisno, Munajat, & Yetty Oktarina. (2021). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 25–32
- Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. 6(1), 88–89. <https://doi.org/10.1515/9783110915655-023>
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirawan, N. (2017). *Cara Mudah Memahami Statistika Ekoni dan Bisnis (Buku 2: Statistika Inferensia)*. Denpasar: Keraras Emas.
- Worldbank. (2007). *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Grha Indo Kreasi
- Wulandari, K., I Nyoman, B., & Ratna, M. (2017). Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Morbiditas di Jawa Timur Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 115–120. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i1.22477>
- Zulfa, A. A., Assayuti, M. J., Septiana, M. P., Bhakti, M. T. P., Ma'arif, M. S., & Apriliani, A. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga. *Karimah Tauhid*, 2(4), 839–848.